



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN



Kemenkum Kalsel News

E-Buletin Edisi Pekan Kelima Oktober



**Kemenkum Kalsel
Serahkan STR
Posbankum**



**Pelantikan Notaris
Pengganti di Kalsel**



**Kemenkum Kalsel
Sosialisasikan SKP dan
PAK**



Kunjungi laman kami



kalsel.kemenkum.go.id



27 Oktober 2025

Apel Pagi Kanwil Kemenkum Kalsel Tekankan Komitmen Menuju WBK dan Capaian Kinerja Optimal



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Apel Pagi rutin pada Senin (27/10), bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, yang bertindak sebagai Pembina Apel, sementara Nizar Alfarizi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, bertugas sebagai Pemimpin Apel.

Dalam amanatnya, Rustam Sakka menekankan pentingnya percepatan penyelesaian target kinerja di sisa waktu tahun 2025. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tetap fokus dan memastikan setiap program kerja dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

“Kita sudah memasuki penghujung tahun. Saya harap seluruh unit kerja segera menuntaskan target kinerjanya, serta memastikan penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan,” ujar Rustam.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan memberikan dukungan penuh dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, memberikan apresiasi atas semangat seluruh jajaran yang terus menjaga konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Ia menegaskan bahwa akhir tahun merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen kinerja dan tata kelola yang akuntabel.

“Kinerja yang baik bukan hanya tentang capaian angka, tetapi juga tentang tanggung jawab dan integritas dalam setiap prosesnya. Saya berharap seluruh jajaran terus berkoordinasi dan bekerja dengan semangat kebersamaan agar seluruh target 2025 dapat tercapai,” ujar Alex Cosmas Pinem.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa komitmen terhadap Zona Integritas menuju WBK harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.

“Meraih WBK bukan tujuan akhir, tetapi langkah awal untuk terus memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Apel pagi berlangsung tertib dan khidmat, menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel untuk memperkuat komitmen dalam menutup tahun 2025 dengan capaian kinerja terbaik.





27 Oktober 2025

Galang Dukungan Inisiasi Indonesia Tentang Royalti, Menkum Supratman Bertemu Perwakilan China-Asean di Xi'an, China



Xi'an, China — Minggu, 26 Oktober 2025, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mewakili Pemerintah Indonesia menghadiri Pertemuan ke-16 China - ASEAN Heads of Intellectual Property Offices di Xi'an. Dalam pertemuan itu, Menteri Hukum meminta dukungan kepada Pemerintah Tiongkok terhadap inisiatif Indonesia di tingkat global. Indonesia akan secara resmi mengajukan The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment pada sidang Komite Tetap WIPO tentang Hak Cipta dan Hak Terkait (SCCR) di Jenewa pada Desember mendatang.

"Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok sebagai anggota WIPO dalam memajukan upaya kolektif ini. Usulan ini penting untuk memastikan tata kelola royalti hak cipta yang adil, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan digital," tegas Menteri Supratman.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum juga menegaskan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pembangunan nasional. Melalui visi ASTA CITA, pemerintah berkomitmen membangun ekonomi kreatif, inovasi, dan industri berbasis kekayaan intelektual.

Indonesia juga tengah melakukan modernisasi kerangka hukum, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta, serta penerapan kebijakan sertifikat kekayaan intelektual sebagai agunan pinjaman perbankan untuk mendukung UMKM dan wirausaha lokal.

"Kami memandang KI bukan sekadar isu teknis, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat daya saing usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ujar Supratman menegaskan.

Sementara itu, Komisioner CNIPA, Shean Changyu dalam kesempatan ini menyampaikan perkembangan IP di China yang sedang mengerjakan petunjuk teknis ke lima kalinya setiap 15 tahun. Sedangkan terkait proposal inisiasi Indonesia China akan mendukung dan mempelajari. "Terkait proposal inisiasi Indonesia, China tentu saja mendukung dalam sidang SCCR dan akan kami pelajari" ungkapnya.

Pertemuan China - ASEAN ke-16 ini menjadi wadah penting bagi dialog kebijakan dan pertukaran pengalaman antara negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. Forum ini juga akan menyusun Rencana Aksi 10 Tahun Baru, yang mencakup kolaborasi potensial di bidang pelatihan, perlindungan budaya tradisional, dan inovasi teknologi di kawasan.

Dalam rangkaian Pertemuan ini, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan China National Intellectual Property Administration (CNIPA) pada Senin, 27 Oktober 2025.

Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di bidang kekayaan intelektual (KI), sekaligus menggantikan perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada 18 Juni 2024.

"MoU ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama kita untuk memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual. Kerja sama ini tidak hanya akan mempererat hubungan antarlembaga, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan ekonomi kedua negara," ujar Menteri Supratman dalam sambutannya.

MoU antara Kementerian Hukum RI dan CNIPA menekankan pada penguatan sistem KI di kedua negara, meliputi paten, desain industri, merek, dan indikasi geografis. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pertukaran pandangan strategis, peningkatan praktik terbaik dalam pemeriksaan KI, serta pengembangan sumber daya manusia.

Isu pelindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional juga menjadi perhatian utama, sejalan dengan fokus baru kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam pelindungan ekspresi budaya tradisional.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Patent Prosecution Highway (PPH) antara DJKI dan CNIPA. Kerja sama ini bertujuan mempercepat proses pemeriksaan paten bagi pemohon dari kedua negara melalui pertukaran hasil pemeriksaan dan pengakuan timbal balik atas keputusan substantif.

Komisioner CNIPA, Shen Changyu dalam kesempatan ini menyampaikan perkembangan IP di China yang sedang mengerjakan petunjuk teknis ke lima kalinya setiap 15 tahun. Sedangkan terkait proposal inisiasi Indonesia China akan mendukung dan mempelajari. "Terkait proposal inisiasi Indonesia, China tentu saja mendukung dalam sidang SCCR dan akan kami pelajari" ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang memperjuangkan inisiatif Indonesia terkait tata kelola royalti hak cipta di lingkungan digital. Ia menilai, inisiatif tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, sekaligus melindungi kepentingan para pencipta dan pelaku ekonomi kreatif di era digital.

"Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai penggerak dalam pembentukan tata kelola kekayaan intelektual global yang adil dan transparan. Kami di wilayah siap mendukung kebijakan nasional ini dengan memperkuat perlindungan kekayaan intelektual di daerah, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Alex Cosmas Pinem.





27 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Lakukan Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Bahas Penguatan Layanan Hukum



Kotabaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Senin, 27 Oktober 2025.

Audiensi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, yang disambut oleh Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kotabaru, Hadlrami, serta jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus sarana koordinasi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam memperkuat sinergi di bidang pelayanan hukum, khususnya dalam upaya memperluas akses keadilan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Alex Cosmas Pinem menyampaikan komitmen Kemenkum Kalsel untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar penyelenggaraan layanan hukum dapat berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar pelaksanaan layanan hukum bisa berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk memperkuat kerja sama dengan Kementerian Hukum, terutama dalam pelaksanaan Posbankum di wilayahnya.

Pertemuan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab Kotabaru dalam menghadirkan layanan hukum yang cepat, tepat, dan menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.





27 Oktober 2025

Perkuat Budaya Kerja Efisien, Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Pelaksanaan Survei Layanan Kesekretariatan Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan (SKLK) Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual pada Senin (27/10).

Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan merupakan instrumen untuk mengukur kualitas layanan kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum. Hasil survei ini akan menjadi Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (ILK), yang menjadi salah satu capaian kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi objektif atas persepsi pegawai terhadap kualitas layanan kesekretariatan, menggambarkan tingkat keberhasilan pelayanan yang dilakukan unit kerja, serta mengidentifikasi harapan pegawai terhadap peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kementerian Hukum.

Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem kegiatan ini diikuti oleh Tim Kerja BSK Hukum Kanwil serta perwakilan dari masing-masing tim kerja. Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan komitmen Kanwil untuk memastikan pelaksanaan survei berjalan optimal dan hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan layanan internal.

Survei dilaksanakan berdasarkan sejumlah dasar hukum, di antaranya Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 dan 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum serta Kantor Wilayah, serta Keputusan Kepala BSK Hukum Nomor PPH-23.LT.03.01 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan.

Adapun pelaksanaan survei Semester II Tahun 2025 berlangsung mulai 27 Oktober hingga 7 November 2025, dengan responden terdiri atas seluruh pegawai di unit eselon I, Kantor Wilayah, dan UPT. Pengisian dilakukan melalui tautan survei daring yang telah disediakan oleh BSK Hukum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memastikan kualitas pelayanan kesekretariatan semakin meningkat, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan kepuasan pegawai. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan survei ini dengan memastikan seluruh pegawai berpartisipasi aktif, guna mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif, responsif, dan transparan di lingkungan Kementerian Hukum.





27 Oktober 2025

Dari Kotabaru untuk Keadilan: Kemenkum Kalsel Serahkan STR dan SK Pembentukan Posbankum



Kotabaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan secara resmi Surat Tanda Register (STR) dan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Senin, 27 Oktober 2025.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dan diterima oleh Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kotabaru, Hadlrami, serta jajaran pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara Kemenkum Kalsel dan Pemkab Kotabaru dalam memperkuat pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui pembentukan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan. Dalam sambutannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan bahwa penyerahan STR dan SK Posbankum menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

“Dengan terbentuknya Posbankum di Kotabaru, kami ingin memastikan bahwa layanan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat secara langsung dan tepat sasaran,” ujarnya.

Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengapresiasi langkah Kementerian Hukum dalam memperluas akses keadilan di daerah. Ia menilai keberadaan Posbankum akan membantu masyarakat desa dan kelurahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Melalui pembentukan Posbankum dan penyerahan STR ini, Kemenkum Kalsel berharap pelayanan hukum di Kabupaten Kotabaru dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.





27 Oktober 2025

Dari Kotabaru untuk Produk Lokal! Kemenkum Kalsel Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis Gula Aren Tirawan



Kotabaru, Humas_Info – Pada Senin, 27 Oktober 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) secara resmi menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk produk unggulan Gula Aren Tirawan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, kepada Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, beserta Kepala Bagian Hukum Setda Kotabaru, Hadlrami, dan jajaran terkait.

Kegiatan ini menandai langkah penting dalam upaya perlindungan produk lokal melalui skema Indikasi Geografis, setelah sebelumnya gula aren Tirawan telah masuk tahap visitasi dan pengajuan IG oleh Kemenkum Kalsel.

Dalam sambutannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan bahwa IG bukan sekadar label, namun pengakuan atas keunikan dan asal-usul suatu produk yang hanya dapat dihasilkan di wilayah tertentu.

“Dengan penyerahan sertifikat IG ini, kami berharap Gula Aren Tirawan dapat semakin memperkuat identitas ekonomi daerah, nilai tambah bagi pengrajin, dan daya saing di pasar nasional serta internasional,” ujar Alex.

Penyerahan sertifikat ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Kotabaru, memperkuat posisi pelaku UMKM dalam industri gula aren, serta menjadi contoh bagi produk khas daerah lainnya di Kalimantan Selatan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui konsep Indikasi Geografis.





21 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Sosialisasikan Posbankum di Kotabaru, Dorong Akses Bantuan Hukum Hingga ke Desa



Amuntai, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, lakukan audiensi dengan Bupati Hulu Sungai Utara, H. Sahrujani, di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara. Pertemuan ini digelar dalam rangka pembinaan dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Bupati H. Sahrujani yang menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Hukum memperluas akses layanan bantuan hukum hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

Peserta audiensi juga menyaksikan video singkat mengenai peran dan manfaat Posbankum, yang menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menjelaskan bahwa Posbankum hadir sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan adil.

“Posbankum menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.





27 Oktober 2025

Bersama Pemprov Kalsel, Kanwil Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Pengelolaan BMD dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kalimantan Selatan yang membahas dua rancangan penting, yakni Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel). Kegiatan berlangsung pada Senin (27/10/25), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Rapat dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hadir Idris dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Said selaku Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Setda Provinsi Kalsel, serta Rahmadani, Kasubbid PADKDI pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel.

Rapat berlangsung dinamis dan produktif dengan membahas keselarasan norma, sistematika, dan teknik penyusunan kedua Raperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Eryck menegaskan bahwa harmonisasi merupakan langkah penting untuk menjamin kualitas produk hukum daerah.

“Melalui proses harmonisasi, kita memastikan setiap ketentuan memiliki dasar hukum yang kuat, konsisten secara redaksional, dan dapat dilaksanakan secara efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Adapun Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun sebagai tindak lanjut atas terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang memperbarui pedoman pengelolaan aset daerah, sedangkan Raperda Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara tim perancang Kanwil dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Raperda yang dibahas hari ini menyentuh dua aspek krusial: penguatan tata kelola aset daerah dan optimalisasi peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah. Kami mendorong agar hasil harmonisasi ini menjadi dasar penyusunan regulasi yang implementatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Rapat harmonisasi ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dalam bentuk berita acara harmonisasi yang akan disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar penyempurnaan naskah Ranperda sebelum tahap fasilitasi berikutnya.





27 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Harmonisasi Raperbup HST tentang Perjalanan Dinas



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas, pada Senin (27/10).

Kegiatan yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel ini dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

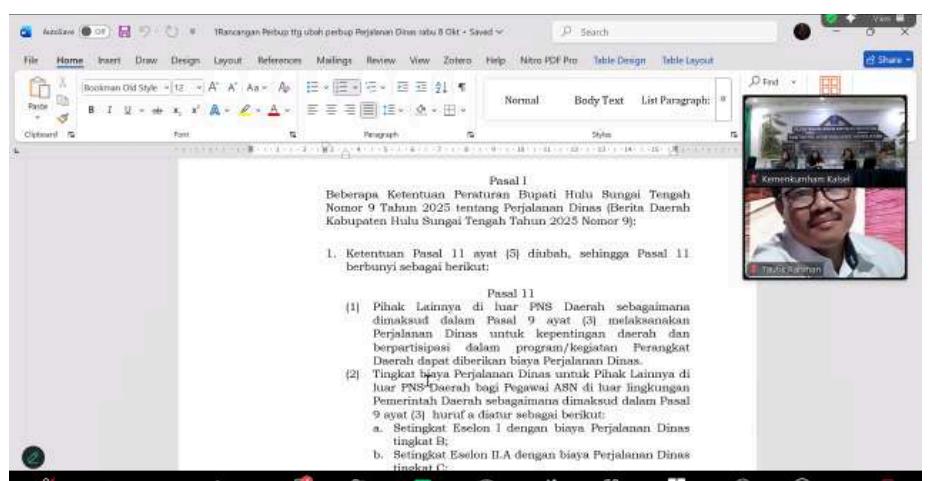
Rapat diikuti oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel, serta perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Bagian Protokol Sekretariat Daerah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pembahasan dilakukan secara mendalam oleh Kelompok Kerja Harmonisasi 2, yang memberikan tanggapan dan masukan terhadap setiap pasal dalam rancangan. Beberapa ketentuan perlu dikaji lebih lanjut agar selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Bahjatul Mardhiah menyampaikan bahwa hasil harmonisasi ini dinyatakan harmonis dari aspek prosedural, sedangkan dari aspek substansi dan teknik penyusunan akan dinyatakan harmonis setelah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Seluruh saran dan masukan dari Tim Harmonisasi telah diterima dan disepakati oleh pihak pemrakarsa untuk segera ditindaklanjuti dalam perbaikan naskah, agar dapat diproses lebih lanjut melalui aplikasi e-Harmonisasi,” ujarnya.

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa hasil harmonisasi akan menjadi dasar penyempurnaan substansi sebelum tahapan selanjutnya. Diharapkan, rancangan yang telah diperbaiki dapat menjadi pedoman yang implementatif dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.





27 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Daerah, pada Senin (27/10).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan ini dipimpin dan dibuka oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, selaku Ketua Tim Kelompok Kerja Harmonisasi 2. Rapat diikuti oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pembahasan rancangan dilakukan secara berurutan oleh Kelompok Kerja Harmonisasi 2, yang memberikan tanggapan umum maupun khusus terhadap setiap pasal secara rinci dan mendalam. Dalam prosesnya, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dikaji lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tetap sejalan dengan asas pembentukan peraturan yang baik.

Saran dan masukan dari Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Kalsel diterima dengan baik oleh pihak pemrakarsa. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menindaklanjuti hasil pembahasan dengan melakukan penyempurnaan terhadap substansi dan teknik penyusunan rancangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukan perbaikan, rancangan tersebut akan diproses lebih lanjut melalui aplikasi e-Harmonisasi untuk memperoleh hasil akhir yang optimal.

Dari hasil pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara dinyatakan harmonis dari aspek prosedural, sementara dari aspek substansi dan teknik penyusunan akan dinyatakan harmonis setelah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil harmonisasi ini disepakati menjadi dasar dalam perbaikan substansi sebelum memasuki tahapan berikutnya. Diharapkan, produk hukum daerah yang dihasilkan dapat menjadi pedoman yang implementatif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.





28 Oktober 2025

Dorong Peningkatan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Audiensi dengan Fakultas Hukum ULM



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam upaya mendorong peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan akademik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan audiensi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pada Senin (27/10), bertempat di Fakultas Hukum ULM.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, bersama tim layanan KI Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, dan diterima oleh Dekan Fakultas Hukum ULM, Achmad Faishal.

Dalam pertemuan tersebut, Riswandi menjelaskan bahwa tujuan audiensi ini adalah untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong peningkatan permohonan pendaftaran KI, khususnya di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum ULM. Ia menyampaikan bahwa karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun hasil penelitian mahasiswa dan dosen perlu memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme Kekayaan Intelektual.

“Banyak karya ilmiah mahasiswa yang memiliki nilai kebaruan dan orisinalitas tinggi, sehingga penting untuk segera dilindungi agar hak-hak penciptanya terjamin,” ujar Riswandi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum ULM, Achmad Faishal, menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Menurutnya, Fakultas Hukum ULM memiliki potensi besar dalam menghasilkan karya ilmiah yang layak mendapatkan perlindungan KI.

“Kami mendukung penuh langkah ini. Ke depan, kami akan mendorong mahasiswa untuk mendaftarkan karya ilmiahnya setelah menyelesaikan skripsi,” ungkapnya.

Ia juga mengusulkan penyusunan pamflet panduan sederhana agar mahasiswa dapat memahami proses pendaftaran KI dengan mudah, serta pelaksanaan sosialisasi langsung untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan KI.



Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dan Fakultas Hukum ULM dapat memperkuat budaya perlindungan Kekayaan Intelektual di kalangan akademisi serta mendorong meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran KI dari lingkungan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan.





28 Oktober 2025

Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Momentum Pererat Sinergi Antar Instansi



Banjarmasin, KI_Info — Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pada Senin (27/10/2025) malam.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Agung RI, Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan, serta perwakilan dari instansi vertikal termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sebelumnya, Rina Virawati, S.H., M.H. Dalam kesempatannya, ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan seluruh pihak selama masa kepemimpinannya selama 1 tahun 4 bulan. Rina berpesan agar seluruh instansi terus menjaga integritas, profesionalisme, serta komitmen terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Tiyas Widiarto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang baru, memperkenalkan diri kepada seluruh tamu undangan. Dalam sambutannya, Tiyas menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menegakkan hukum dan mendukung program pembangunan daerah, sekaligus berkomitmen melanjutkan kepemimpinan yang telah dibangun sebelumnya.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhibin, turut memberikan sambutan sekaligus apresiasi kepada Rina Virawati atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat. Ia juga menyampaikan dukungan penuh kepada Kepala Kejati yang baru untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Sebagai bentuk penghargaan, acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada Kepala Kejati sebelumnya dan pejabat baru. Kegiatan kemudian ditutup dengan ramah tamah, yang menjadi ajang mempererat hubungan silaturahmi dan koordinasi antara para pejabat daerah dan instansi vertikal di Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kejaksaan Tinggi dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan semakin kuat, dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.





28 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97: “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”



Banjarmasin, Humas_Info — Dalam semangat memperkokoh persatuan dan menumbuhkan jiwa kebangsaan generasi muda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di Lapangan Upacara Kanwil, Selasa (28/10).

Upacara yang mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu” ini diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel bersama Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalsel, Yan Wely Wiguna, dengan peserta upacara terdiri atas pejabat manajerial dan non manajerial, PPPK, CPNS, serta tenaga outsourcing.

Seluruh peserta tampak mengenakan Batik KORPRI dan peci hitam untuk ASN, serta kemeja putih dan celana hitam bagi CPNS. Upacara berlangsung khidmat dengan susunan acara yang mengacu pada pedoman resmi Kementerian Hukum, dimulai dari pengibaran Bendera Merah Putih, pembacaan Teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, hingga pembacaan Keputusan Kongres Pemuda 1928.

Dalam amanat upacara yang disampaikan melalui pidato Menteri Pemuda dan Olahraga, ditekankan bahwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan tonggak tekad dan keberanian generasi muda dalam memperjuangkan persatuan bangsa. Generasi muda diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, berinovasi menghadapi tantangan global, serta mewujudkan cinta tanah air melalui tindakan nyata.

Pidato tersebut juga mengutip pesan Presiden Republik Indonesia agar para pemuda tidak takut bermimpi besar dan tidak takut gagal, karena dari semangat juang dan keberanian itulah masa depan bangsa dibangun. Amanat ditutup dengan seruan membangkitkan semangat “Salam Pemuda!” sebagai wujud komitmen menjaga api perjuangan yang diwariskan para pendahulu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, secara terpisah menyampaikan bahwa upacara berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh khidmat. “Peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum penting untuk memperteguh semangat persatuan dan mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa bertumpu pada energi dan integritas pemuda,” ujarnya.

Upacara ditutup dengan pembacaan doa sebagai ungkapan syukur dan harapan agar semangat Sumpah Pemuda terus hidup di hati seluruh insan Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.





28 Oktober 2025

ASN Hebat Dimulai dari Kinerja Terukur: Kemenkum Kalsel Gelar Sosialisasi SKP dan PAK



Banjarmasin, Humas_Info — Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai di bidang manajemen kinerja aparatur sipil negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Penyusunan Penilaian Angka Kredit (PAK) berdasarkan Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit. Kegiatan ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dengan antusias, Selasa (28/10/25).

Acara dibuka dengan laporan ketua pelaksana, Eko Herdianto, selaku Analis SDM Aparatur Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pegawai terhadap mekanisme penilaian kinerja dan penghitungan angka kredit sesuai kebijakan terbaru.

Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN dalam memahami sistem manajemen kinerja berbasis hasil.

“Pemahaman terhadap penyusunan SKP dan penjenjangan kinerja sangat penting agar setiap pegawai mampu mengukur kontribusinya terhadap tujuan organisasi,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni Vicke Natalia Stevannie, Penelaah Teknis Kebijakan, dan Cindi Adi Pertiwi, Asesor SDM Aparatur Muda. Kedua narasumber memberikan pemaparan mendalam terkait implementasi penjenjangan kinerja, mekanisme konversi predikat kinerja ke angka kredit, serta penyusunan PAK yang terintegrasi dengan hasil kinerja individu.

Sesi pemaparan dan diskusi dimoderatori oleh Slamet Riyadi, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Kanwil Kemenkum Kalsel, yang memandu jalannya forum secara interaktif. Peserta terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman dalam proses penyusunan SKP dan penghitungan angka kredit di unit kerja masing-masing.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel dapat menerapkan prinsip manajemen kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.





28 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Koordinasikan Pelaksanaan Diklat Paralegal di Posbankum Tanah Bumbu



Tanah Bumbu, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Penyuluhan Hukum melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu, 28 Oktober 2025.

Koordinasi tersebut dilakukan bersama Indra Saddhavanta, Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Diklat Paralegal, sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat desa dan kelurahan dalam memberikan layanan hukum dasar melalui Posbankum.

Tim Penyuluhan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan bahwa kegiatan Diklat Paralegal di tingkat Posbankum akan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses bantuan hukum dan memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban hukum.

“Diklat ini dirancang untuk mencetak paralegal yang mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara non litigasi, serta menjadi penghubung antara warga dengan lembaga bantuan hukum,” ujar perwakilan Tim Penyuluhan Hukum Kemenkum Kalsel.

Sementara itu, Indra Saddhavanta menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap program Kementerian Hukum dalam memperluas akses keadilan di daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat eksistensi Posbankum sebagai ujung tombak layanan hukum bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.



28 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Harmonisasi Tiga Raperbup Tapin tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kelompok Kerja Harmonisasi 1 menyelenggarakan rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tapin, Selasa (28/10/2025), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Adapun ketiga rancangan yang dibahas meliputi Raperbup tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Raperbup tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus, serta Raperbup tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rapat dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya selaku Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi 1. Kegiatan turut dihadiri oleh para perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

Dalam pembahasan, tim harmonisasi menelaah secara berurutan ketiga rancangan peraturan tersebut dari sisi substansi maupun teknik penyusunan. Beberapa pasal mendapat perhatian khusus untuk dikaji lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap berlandaskan atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

“Saran dan masukan yang kami berikan diterima dengan baik oleh pihak pemrakarsa. Mereka akan segera melakukan penyempurnaan agar rancangan ini dapat diproses lebih lanjut melalui aplikasi e-harmonisasi,” ujar Eryck Yulianto.



Dari hasil pembahasan, Raperbup Tapin tersebut dinyatakan harmonis dari aspek prosedural, sementara dari aspek substansi dan teknik penyusunan akan dinyatakan harmonis setelah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen hasil harmonisasi dan sesi foto bersama. Hasil harmonisasi ini diharapkan menjadi pedoman dalam perbaikan substansi serta mendukung penyusunan peraturan yang implementatif dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tapin.





28 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Perkuat Sinergi dan Profesionalisme PPNS di Tanah Bumbu



Tanah Bumbu, AHU_Info — Dalam upaya memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bagian penting dari sistem penegakan hukum nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi PPNS di Aula Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (28/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta jajaran pegawai dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Turut hadir Kepala Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu serta perwakilan PPNS dari berbagai instansi di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme PPNS di daerah. Menurutnya, PPNS merupakan ujung tombak penegakan hukum di sektor masing-masing yang berperan strategis dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya.

“PPNS adalah garda terdepan dalam memastikan tegaknya hukum di sektor masing-masing. Untuk itu, pemahaman yang baik terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan menjadi hal mendasar agar penyidikan berjalan profesional, berintegritas, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Alex Cosmas Pinem.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang peningkatan kapasitas, tetapi juga bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara PPNS, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum lainnya demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan berwibawa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan PPNS dapat memperdalam pemahaman terhadap kewenangan dan tanggung jawab yang diemban, meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan penyidikan, serta menumbuhkan semangat integritas dan tanggung jawab moral dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara PPNS dan aparat penegak hukum lainnya untuk mewujudkan penegakan hukum yang sinergis dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi yang produktif antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan para PPNS daerah. Salah satu isu yang mencuat adalah terkait jumlah atau kuota PPNS di setiap instansi pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menjelaskan bahwa tidak terdapat batasan numerik dalam peraturan perundang-undangan mengenai jumlah PPNS.

Ia menambahkan bahwa penetapan jumlah PPNS disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan hasil analisis beban kerja masing-masing instansi. Usulan pengangkatan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan fungsional instansi yang bersangkutan.

Dalam kesempatan yang sama, Meidy Firmansyah juga menegaskan pentingnya pelaporan mutasi jabatan atau perpindahan instansi bagi setiap PPNS. Menurutnya, pelaporan mutasi merupakan bagian penting dari tertib administrasi dan pembaruan basis data PPNS agar koordinasi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan optimal.

“Pelaporan mutasi menjadi hal mendasar untuk menjaga akurasi data nasional serta memastikan kesinambungan fungsi penyidikan di setiap instansi. Dengan data yang valid, pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS dapat dilakukan secara terukur dan efektif,” jelasnya.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antar-PPNS di wilayah Kalimantan Selatan. Para peserta tampak antusias dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait pelaksanaan penyidikan di bidang tugas masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berharap PPNS di daerah semakin memahami peran strategisnya dalam menegakkan hukum secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.

“Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus membina dan memperkuat kapasitas PPNS di seluruh wilayah sebagai wujud nyata kontribusi terhadap penegakan hukum yang adil dan berwibawa,” pungkas Alex Cosmas Pinem.





28 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Audit Notaris di Tanah Bumbu, Pastikan Kepatuhan PMPJ



Tanah Bumbu, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan Audit Kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) pada tiga kantor notaris di Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (28/10).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem bersama tim Bidang Pelayanan AHU. Audit PMPJ merupakan tindak lanjut dari hasil analisis kuesioner PMPJ yang telah diisi oleh seluruh notaris di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tiga notaris di Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagai objek pemeriksaan (auditee) dengan kategori tingkat risiko sangat tinggi.

Audit ini diawali dengan pemaparan maksud dan tujuan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kepatuhan notaris terhadap penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Hukum dalam mendukung pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di sektor jasa hukum.

Dalam arahannya, Kabid Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, menyampaikan bahwa audit ini merupakan langkah konkret dalam memastikan setiap notaris melaksanakan tanggung jawab profesionalnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengharapkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan notaris terhadap prinsip-prinsip pencegahan TPPU dan TPPT. Kepatuhan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk integritas profesi,” ujarnya.

Kegiatan audit berjalan dengan tertib dan lancar, serta mendapat respon positif dari para notaris yang menjadi auditee. Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka memperkuat tata kelola layanan hukum yang transparan dan berintegritas.



29 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Sinergi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Kota Banjarmasin



Perwakilan Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Haryanta, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalsel, termasuk rencana pembentukan Pusat Layanan Kekayaan Intelektual di Kota Banjarmasin untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan KI.

Rapat menghasilkan beberapa kesepakatan tindak lanjut, antara lain penyusunan program sosialisasi dan edukasi tentang KI, pembentukan pusat layanan KI di Kota Banjarmasin, serta peningkatan koordinasi antar instansi guna memperlancar proses pendaftaran dan perlindungan KI di daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan perlindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual di Kota Banjarmasin semakin optimal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Kekayaan Intelektual Kota Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Banjarmasin pada Selasa (28/10) di Aula Bappeda Litbang Kota Banjarmasin.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin, Kanwil Kemenkum Kalsel, dan perangkat daerah terkait dalam perlindungan serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI).

Rapat dihadiri oleh berbagai instansi, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Pendidikan; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Kanwil Kemenkum Kalsel diwakili oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Riswandi, bersama M. Aji Rifani dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Dalam paparannya, Riswandi menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk mendorong masyarakat, terutama pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), agar mendaftarkan hasil karya dan produknya sebagai bentuk perlindungan hukum dan penghargaan terhadap hak cipta.

“Perlindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya soal hukum, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi kreatif daerah. Dengan kolaborasi lintas instansi, kita bisa menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan menghargai karya anak bangsa,” ujarnya.





29 Oktober 2025

Sinkronisasi Regulasi, Kemenkum Kalsel Dorong Raperda Tabalong Lebih Akuntabel dan Efektif Melalui Rapat Harmonisasi



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rabu (29/10), secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Rapat dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, yang memfasilitasi pembahasan teknis penyempurnaan substansi rancangan peraturan daerah bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Raperda ini diajukan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam rapat harmonisasi, tim perancang Kemenkum Kalsel memberikan sejumlah masukan normatif dan redaksional terhadap draf Ranperda, antara lain penyelarasan terminologi, penguatan dasar hukum, serta penyesuaian rumusan pasal dengan regulasi terbaru terkait pengelolaan aset daerah.

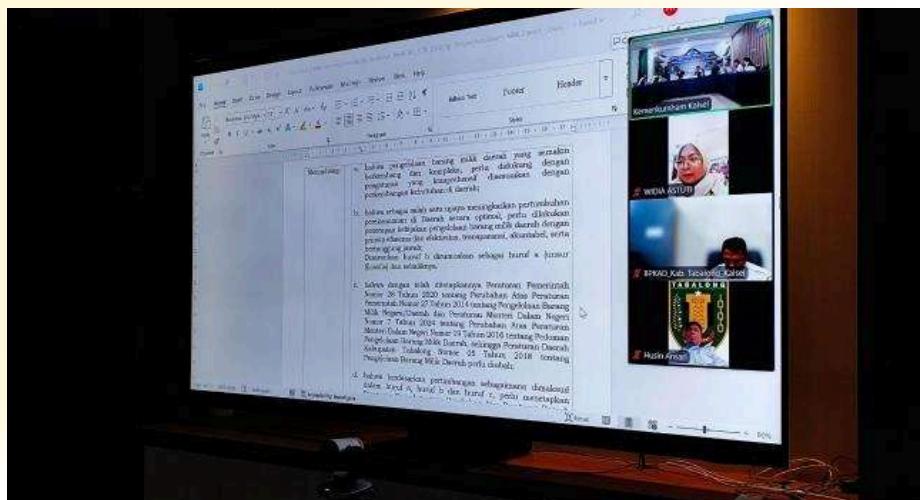
Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap peraturan daerah memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Harmonisasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret untuk memastikan Ranperda memiliki keselarasan norma, kejelasan rumusan, dan daya laku yang efektif di lapangan," ujar Alex.

"Kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan barang milik daerah," tambahnya.

Dari pihak Pemkab Tabalong, rapat diikuti oleh perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta pejabat teknis dari berbagai bidang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar undangan.

Rapat berjalan dinamis dengan komitmen bersama untuk memastikan rancangan peraturan daerah ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aplikatif, serta mampu menjawab kebutuhan pengelolaan aset daerah yang tertib, efisien, dan akuntabel.



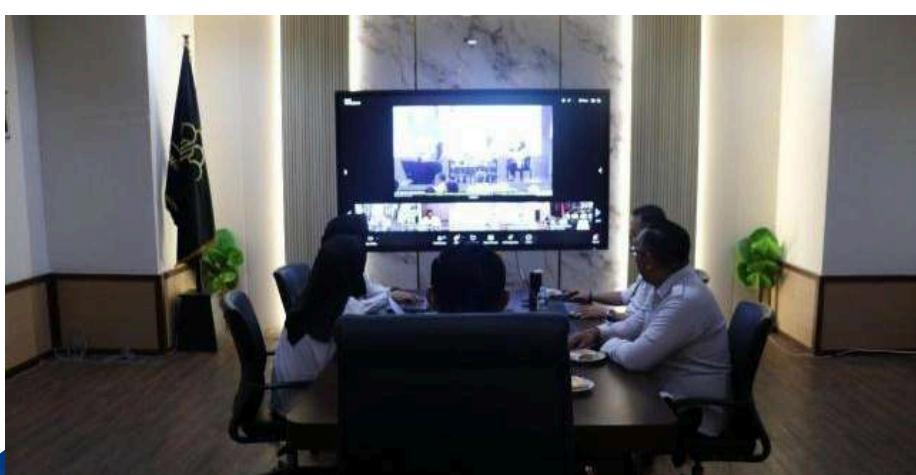
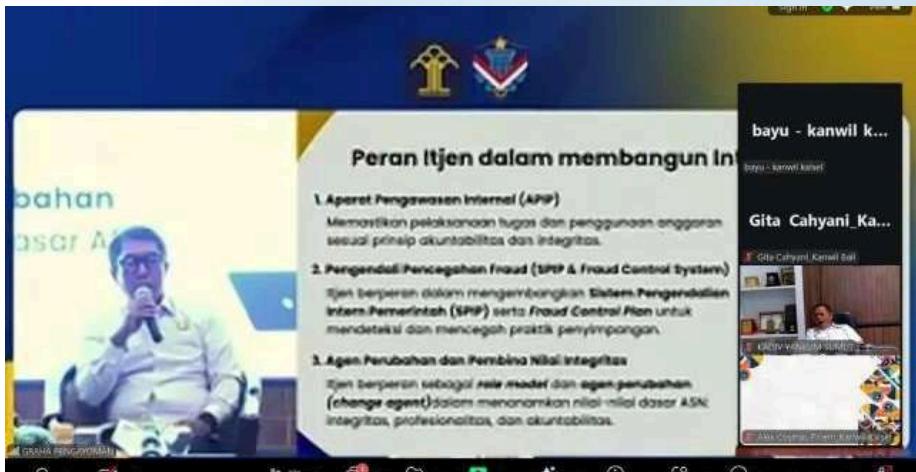


29 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar Interaktif “Karakter Berintegritas untuk Pelayanan Publik” Secara Daring



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan webinar Interaktif Transformasi Integritas yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, pada Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Wisnu Nugroho Dewanto selaku Plt. Inspektur Jenderal Kemenkum RI, Dr. Baroto selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkum RI, Dr. Fajar Sulaeman Taman selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenkum RI, dan Shierlen Octavia, Psikolog Klinis dari NALA Mindspace.

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, kegiatan diikuti secara daring oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah bersama jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI).

Melalui webinar ini, peserta diajak untuk memahami pentingnya membangun karakter pribadi yang berintegritas dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Paparan dari Inspektorat Jenderal menekankan bahwa pengawasan internal bukan hanya sebatas audit, melainkan upaya membangun nilai dan keteladanan agar integritas ASN tertanam kuat dalam budaya organisasi.

Sementara itu, sesi interaktif bersama NALA Mindspace mengajak peserta untuk melakukan refleksi diri melalui pendekatan psikologis dan kegiatan partisipatif seperti Temptation Auction dan The Line Game yang menggambarkan dilema etika dalam kehidupan ASN.

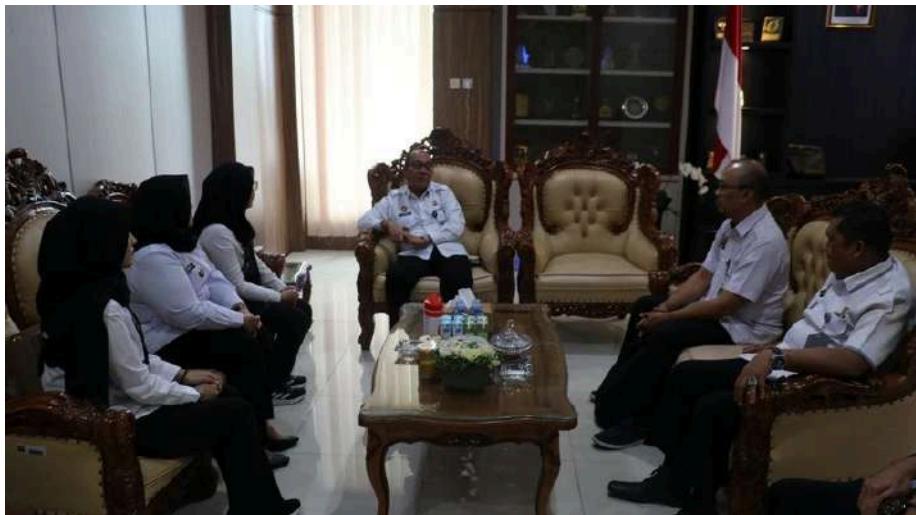
Selain itu, turut dipaparkan kebijakan terbaru terkait Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemenkum sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 31 Tahun 2025, yang menjadi pedoman dalam menjaga martabat, kehormatan, dan profesionalitas ASN.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum, termasuk di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, beretika, dan berintegritas tinggi dalam melayani masyarakat.



29 Oktober 2025

Monitoring Latsar ASN, Kakanwil Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan Tim Badiklat Jateng



Banjarmasin, Humas_Info — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menerima kunjungan dari Tim Monitoring Balai Diklat Hukum Jawa Tengah pada Rabu (29/10). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan monitoring pelaksanaan aktualisasi peserta Pelatihan Dasar (Latsar) ASN di wilayah Kalimantan.

Tim monitoring Badiklat Hukum Jateng, melaksanakan kegiatan di tiga wilayah, yakni Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Tim bertujuan memastikan pelaksanaan aktualisasi peserta Latsar ASN berjalan optimal, relevan dengan nilai-nilai dasar ASN, dan memberikan dampak nyata di lingkungan kerja.

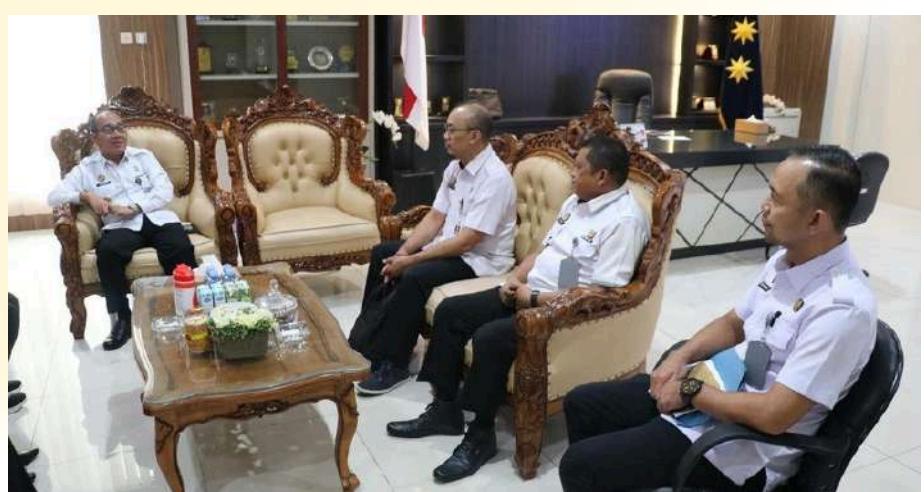
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalsel didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, serta Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM, Eko Herdianto menerima kunjungan tim dari Balai Diklat Hukum Jateng yang hadir antara lain Diah Yuli Pratiwi, Rohyati, Tri Agung Nugroho, dan Dipta Ninggar Anjarini.

Kakanwil Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan komitmen Balai Diklat Hukum Jateng dalam mengawal pelaksanaan Latsar ASN.

“Kegiatan monitoring ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peserta Latsar benar-benar menerapkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam aktualisasi di tempat kerja. Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana refleksi bagi peserta dan pembimbing untuk terus meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Alex.

Kegiatan monitoring ini juga menjadi sarana evaluasi bagi mentor dan atasan langsung peserta. Tim menilai sejauh mana proyek aktualisasi memberi dampak positif terhadap unit kerja, serta bagaimana peserta mampu berinovasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Penilaian dilakukan tidak hanya melalui laporan tertulis, tetapi juga observasi lapangan dan umpan balik dari rekan kerja.

Melalui kegiatan ini, Balai Diklat Hukum Jawa Tengah berupaya menjaga kualitas output pelatihan agar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur negara.





29 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Bersama Badiklat Jateng Lakukan Monitoring Aktualisasi Latsar CPNS 2025



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan tim dari Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Monitoring Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025, Rabu (29/10).

Monitoring ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung penerapan rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh peserta Latsar di lingkungan kerja. Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dengan dihadiri para mentor dan peserta Latsar dari berbagai unit kerja.

Sebanyak 16 CPNS dari berbagai jabatan fungsional mengikuti kegiatan ini, di antaranya Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Analis Kebijakan, Analis Kekayaan Intelektual, Pranata Komputer, dan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. Para peserta didampingi oleh mentor dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kanwil.

Tim monitoring dari Badiklat Hukum Jawa Tengah terdiri atas Diah Yuli Pratiwi, Rohyati, Tri Agung Nugroho, dan Dipta Ninggar Andjarini. Mereka melakukan peninjauan sekaligus memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan aktualisasi yang telah diterapkan oleh peserta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama Badiklat Hukum Jawa Tengah dalam membimbing proses pembentukan ASN yang berintegritas dan profesional.

“Aktualisasi ini menjadi bagian penting dalam membentuk karakter ASN yang berorientasi pelayanan dan mampu menerapkan nilai-nilai dasar Kemenkum,” ujarnya.

Dengan terlaksananya kegiatan monitoring ini, diharapkan seluruh peserta Latsar CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan mampu menginternalisasi nilai-nilai ASN dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



29 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas



Banjarbaru, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) bersama Help Desk AHU menghadiri Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu, (29/10/2025).

Rapat ini membahas langkah-langkah pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Ormas di daerah guna menjaga ketertiban umum serta mencegah penyimpangan dari ketentuan hukum. Pembentukan Satgas Terpadu Pengawasan Ormas menjadi langkah sinergis lintas instansi dalam memperkuat pengawasan dan penindakan secara efektif.

Dalam rapat yang dihadiri oleh unsur Forkopimda dan instansi vertikal, dibahas pula isu aktual terkait kemunculan ormas baru Serikat Tahanan Politik Indonesia (SPPI) serta pentingnya validasi data ormas yang tercatat di Kementerian Hukum, yang saat ini berjumlah 170 organisasi di Kalimantan Selatan.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel, Dewi Woro Lestari selaku Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Hukum dan Kesbangpol dalam memastikan setiap Ormas beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui sinergi Tim Terpadu ini, diharapkan pengawasan terhadap Ormas dapat berjalan lebih optimal dalam menjaga kondusifitas, stabilitas, dan keamanan wilayah Kalimantan Selatan.



29 Oktober 2025

Ditjen AHU Lakukan Koordinasi Penguatan Layanan Daktiloskopi di Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan koordinasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam rangka penguatan layanan Jasa Hukum di bidang Daktiloskopi, pada Rabu (29/10/2025).

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah dan disambut langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, beserta jajaran pejabat dan pelaksana Bidang AHU.



Tim dari Direktorat Pidana Ditjen AHU hadir untuk melakukan pembahasan teknis dan identifikasi kendala lapangan dalam pelaksanaan layanan Sidik Jari dan Blanko Daktiloskopi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Kementerian Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan daktiloskopi serta koordinasi terkait upaya peningkatan kualitas data dan tata kelola Administrasi Hukum Umum di wilayah.



Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Ditjen AHU untuk memastikan pelaksanaan kebijakan layanan hukum di daerah berjalan efektif, akuntabel, dan terintegrasi dalam sistem administrasi hukum nasional.





29 Oktober 2025

Mahasiswa Humaniora UNISM Belajar Langsung Proses Legislasi Daerah di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan studi lapangan dari Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di dua lokasi, yakni Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan Ruang Rapat BerAKHLAK ini diikuti oleh dosen serta mahasiswa Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia. Turut hadir empat dosen pendamping, yaitu Muhammad Mahendra Abdi, Achmad Rizky Hasani, Deni Nofrizal, dan Yulian Muhtadin.

Dalam sambutannya, Muhammad Mahendra Abdi dan Achmad Rizky Hasani mewakili pihak Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang telah berkenan menerima kunjungan studi lapangan ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh wawasan praktis yang melengkapi teori yang selama ini dipelajari di lingkungan kampus, khususnya terkait dengan bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan serta materi terkait teknik penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Materi disampaikan oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kanwil Kemenkum Kalsel, yaitu M. Novi Saputra, Ryna Frenciska, Nizar Al Farisy, dan Ikhwan Ridhani. Para narasumber menjelaskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian penting dari fungsi pembinaan hukum di daerah.

Dalam pemaparannya, para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah menyampaikan secara komprehensif tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan. Selain itu, dijelaskan pula teknik penyusunan yang meliputi struktur peraturan, mulai dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, hingga lampiran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memahami secara langsung proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap praktik hukum di instansi pemerintah.





29 Oktober 2025

Pelantikan Notaris Pengganti di Kalsel, Komitmen Perkuat Pelayanan Hukum Masyarakat



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Pengganti pada Kamis (30/10/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Adapun notaris pengganti yang dilantik terdiri atas Rika Mega Mustika, S.H. sebagai Notaris Pengganti Kota Banjarmasin menggantikan Notaris Mery Liana, S.H., M.Kn. yang menjalani cuti; Nazifatun Nisa, S.H. sebagai Notaris Pengganti Kabupaten Hulu Sungai Utara; M. Puja Dezhar Kharisma, S.H., M.Kn. sebagai Notaris Pengganti Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan Noorsella Syailina, S.H., M.Kn. sebagai Notaris Pengganti Kabupaten Tabalong.

Dalam arahannya, Meidy Firmansyah menekankan agar notaris pengganti senantiasa menjunjung tinggi integritas, etika profesi, dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas, serta disiplin dalam melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari akuntabilitas profesi.

Turut hadir dalam kegiatan ini para pejabat struktural di lingkungan Kanwil, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong, serta perwakilan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dari berbagai kabupaten/kota.





30 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Kamis (30/10).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Eko Herdianto, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, beserta jajaran fungsional lainnya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap kebijakan dan peraturan terbaru terkait pembinaan serta pengembangan karier jabatan fungsional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Dalam arahannya, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Fajar Sulaeman Taman, menekankan pentingnya peran jabatan fungsional sebagai motor penggerak profesionalisme ASN di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pejabat fungsional mampu memahami mekanisme pembinaan karier yang berorientasi pada kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memberikan paparan mendalam mengenai kebijakan pembinaan karier ASN fungsional.

Melalui partisipasi ini, jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN, demi mendukung terwujudnya tata kelola kepegawaian yang adaptif, efektif, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Hukum.





30 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Diskusi Strategi Kebijakan: Dorong Standar Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Mewujudkan Akses Keadilan di Kalimantan Selatan Melalui Standar Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”. Kegiatan digelar secara daring bekerja sama dengan TVRI Kalsel dan disiarkan dari Hotel Victoria River View Banjarmasin, Kamis (30/10/25).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indraday dan diikuti oleh peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga bantuan hukum, serta masyarakat sipil baik secara langsung maupun virtual.

Dalam laporannya, Alex Cosmas Pinem selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari analisis dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah berjalan selama empat tahun.

“Forum ini diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan dan pengalaman strategis dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang,” ujar Alex.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DSK bertujuan untuk menyebarluaskan hasil analisis implementasi dan evaluasi dampak pelaksanaan Permenkum tersebut, menyampaikan rekomendasi hasil analisis kepada pemangku kebijakan sesuai kewenangan, serta meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan hukum di wilayah Kalimantan Selatan.

Kegiatan diisi dengan pemaparan dari tiga narasumber, yaitu Constantinus Kristomo selaku Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN yang diwakili Edi selaku Penyuluhan Hukum Ahli Madya, Arie Satya, Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM Setda Prov. Kalsel, Erlina, Dosen Fakultas Hukum ULM. Diskusi dipandu oleh Rini Maulina sebagai moderator, serta menghadirkan Misliyani sebagai fasilitator bahasa isyarat guna memastikan inklusivitas kegiatan.

Sesi diskusi berlangsung interaktif, membahas langkah konkret penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Para narasumber menekankan pentingnya sertifikasi paralegal, penguatan jejaring rujukan kasus, serta penganggaran berkelanjutan bagi lembaga bantuan hukum agar masyarakat di pelosok Banua dapat menikmati akses keadilan secara nyata.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indraday, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan kebijakan berbasis bukti lapangan sangat krusial dalam memperbaiki mutu layanan hukum.

“Kalimantan Selatan menunjukkan inisiatif yang patut diapresiasi. Upaya seperti ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memastikan setiap warga negara, terutama kelompok rentan, memperoleh hak konstitusionalnya atas bantuan hukum yang berkualitas,” ujarnya.

Diskusi yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan lanjutan.

Menutup kegiatan, Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Semoga semangat dan komitmen yang kita bangun hari ini menjadi energi positif untuk memastikan hak atas bantuan hukum benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.



30 Oktober 2025

Sinergi Kemenkum Kalsel dan TVRI Kalsel Wujudkan Informasi Publik Berkualitas Lewat Diskusi Strategi Kebijakan



Banjarmasin, Humas_Info — Kolaborasi apik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan TVRI Kalimantan Selatan menjadi kunci sukses terselenggaranya Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Mewujudkan Akses Keadilan di Kalimantan Selatan Melalui Standar Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas.”

Kegiatan yang digelar secara daring dan disiarkan langsung dari Hotel Victoria River View Banjarmasin pada Kamis (30/10/25) ini menjadi salah satu bentuk nyata sinergi antara instansi pemerintah dan lembaga penyiaran publik dalam memperluas jangkauan informasi kebijakan hukum kepada masyarakat luas.

Melalui kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Kalsel tidak hanya menghadirkan ruang dialog strategis bagi para pemangku kepentingan di bidang hukum, tetapi juga memastikan bahwa hasil-hasil diskusi dan rekomendasi kebijakan dapat diketahui secara transparan oleh publik. Dukungan teknis dan penyiaran yang dilakukan oleh TVRI Kalsel memungkinkan masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, untuk turut menyimak jalannya diskusi dan memahami arah kebijakan bantuan hukum nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas dukungan TVRI Kalsel dalam menyiaran kegiatan strategis ini.

“Kolaborasi dengan TVRI Kalsel menjadi bukti bahwa sinergi antar instansi dapat memperkuat fungsi edukasi publik, terutama dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya standar layanan bantuan hukum yang berkualitas,” ujar Alex.

Menurutnya, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum, sejalan dengan komitmen Kemenkum untuk mewujudkan tata kelola komunikasi publik yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan TVRI Kalsel diharapkan terus berlanjut, tidak hanya dalam penyiaran kegiatan, tetapi juga dalam membangun literasi hukum masyarakat melalui berbagai program informatif yang mendorong budaya taat hukum di Banua.





30 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan III TA 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Kamis, 30 Oktober 2025, bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Banjarmasin.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Riswandi, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardiah.

Turut hadir seluruh jajaran pejabat struktural dan staf di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam arahannya, Alex Cosmas Pinem menekankan pentingnya kegiatan Monev sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja sekaligus melakukan refleksi atas pelaksanaan program di triwulan sebelumnya.

“Monev ini bukan sekadar agenda administrasi, tetapi momentum evaluasi bersama untuk memastikan bahwa setiap program dan anggaran yang dikelola telah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Alex.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus menjaga konsistensi kinerja dan memperkuat sinergi antar bidang menjelang akhir tahun anggaran, guna memastikan target kinerja Kemenkum di daerah dapat tercapai sesuai indikator yang ditetapkan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing bidang terkait capaian output, realisasi anggaran, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dan strategi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja di triwulan berikutnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas kinerja dan optimalisasi anggaran, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi hasil.



30 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Dampingi Koperasi Merah Putih Daftarkan Merek Kolektif



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) memberikan pendampingan teknis pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Banjarmasin, Kamis, 30 Oktober 2025, bertempat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dan dihadiri oleh jajaran pengurus serta anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih. Turut hadir mewakili Kanwil Kemenkum Kalsel, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Riswandi, beserta tim layanan KI.

Dalam sambutan pembuka, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Edy Junaidi, menegaskan pentingnya pendaftaran merek kolektif sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk lokal, sekaligus sarana peningkatan daya saing UMKM di wilayah Banjarmasin.

Selanjutnya, Riswandi menyampaikan materi terkait tahapan teknis dalam pendaftaran merek kolektif serta manfaat yang diperoleh koperasi melalui perlindungan hak kekayaan intelektual.

“Pendaftaran merek kolektif bukan hanya soal identitas produk, tetapi juga bentuk pengakuan hukum atas hasil kerja dan kreativitas bersama. Dengan perlindungan ini, koperasi dapat memperkuat posisi produknya di pasar dan menghindari potensi pelanggaran merek,” ujar Riswandi.

Tim Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel juga memberikan panduan teknis kepada peserta terkait proses pembentukan merek kolektif, penyusunan dokumen, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap merek yang akan digunakan oleh koperasi.



Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab antara peserta dan tim KI, yang membahas berbagai kendala praktis dan solusi dalam proses pendaftaran merek.

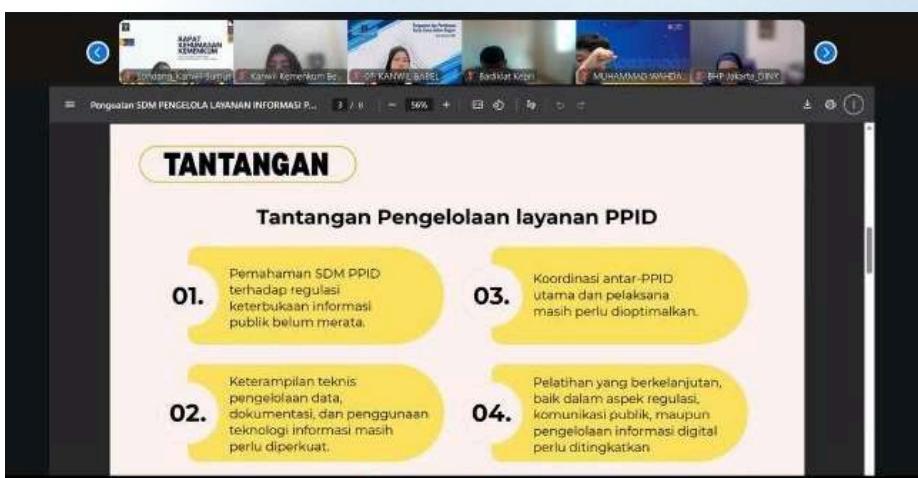
Melalui kegiatan ini, diharapkan Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat segera memiliki merek kolektif terdaftar yang menjadi simbol kebersamaan sekaligus kekuatan ekonomi lokal berbasis hukum.





30 Oktober 2025

Penguatan Kapasitas SDM PPID, Kemenkum Tegaskan Komitmen terhadap Transparansi Publik



Banjarmasin, Humas_Info — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Seminar Penguatan SDM Pengelola PPID yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum pada Kamis (30/10/2025) secara daring.

Kegiatan ini dibuka dan dipaparkan oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Hukum. Dalam paparannya, Ronald menyampaikan bahwa PPID merupakan garda terdepan transparansi informasi yang memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Seminar ini juga membahas berbagai tantangan pengelolaan layanan informasi, seperti perlunya pemerataan pemahaman regulasi keterbukaan informasi, peningkatan keterampilan teknis pengelolaan data dan dokumentasi, serta optimalisasi koordinasi antara PPID utama dan pelaksana.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan pelaksana kehumasan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola PPID di jajaran Kementerian Hukum semakin profesional, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga dapat menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.





30 Oktober 2025

Pelantikan Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Kalsel Periode 2025–2028 Digelar Secara Daring Bersama 33 Kantor Wilayah se-Indonesia



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Periode Tahun 2025–2028 pada Kamis (30/10/2025) bertempat di Ruang Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti secara serentak oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Anggota MKN Wilayah Kalimantan Selatan yang dilantik berjumlah tujuh orang, yaitu Alex Cosmas Pinem (Kepala Kantor Wilayah), Meidy Firmansyah (Kepala Divisi Pelayanan Hukum), Dr. Achmad Faishal, AKBP Mahrida, Achmad Adji Suseno, Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, dan Mohammad Farid Syarifudin.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan serta pengambilan sumpah/janji jabatan dan kata-kata pelantikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kegiatan kemudian diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pelantikan oleh para pejabat yang dilantik.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Widodo, S.H., M.H., menegaskan bahwa profesi notaris memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian dan kepercayaan hukum di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa notaris bukan sekadar pejabat administratif, melainkan pemegang amanah publik yang harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Integritas adalah dasar utama agar profesi notaris tetap dipercaya dan bermartabat," tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Widodo menekankan pentingnya peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurutnya, perlindungan hukum terhadap notaris bukan berarti kebal hukum. Oleh karena itu, anggota MKN harus bersikap profesional, objektif, dan transparan dalam memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran. Kehadiran unsur Aparat Penegak Hukum (APH) dalam keanggotaan MKN juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Kementerian Hukum, MKN, dan APH dalam membangun sistem peradilan yang berintegritas, akuntabel, dan menjunjung tinggi keadilan.





31 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Bimtek Aktualisasi Paralegal Posbankum se-Hulu Sungai Selatan



Banjarbaru, Humas_Info – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Bimbingan Teknik Aktualisasi Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sabtu, 1 November 2025, bertempat di Hotel Novotel Banjarmasin Airport, Banjarbaru.

Kegiatan ini diikuti oleh 148 paralegal yang berasal dari desa dan kelurahan di 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Loksado, Padang Batung, Telaga Langsat, Angkinang, Daha Selatan, Daha Barat, dan Daha Utara.

Turut hadir berbagai unsur lembaga dan instansi, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Pengadilan Negeri Kandangan, Polres HSS, Kejaksaan Negeri HSS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), LKBH Universitas Widya Karya, dan LBH Negara Daha.

Dalam kegiatan tersebut, para paralegal dari desa dan kelurahan memaparkan hasil aktualisasi kegiatan bantuan hukum dan penyuluhan masyarakat yang telah dilaksanakan di wilayah masing-masing. Setiap peserta berbagi pengalaman terkait permasalahan hukum di masyarakat, strategi penyelesaian non litigasi, hingga langkah kolaboratif dalam memperkuat kesadaran hukum warga.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi melalui Penyuluhan Hukum Ahli Muda, Dianor, yang memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil aktualisasi para paralegal, serta mendorong peningkatan peran mereka sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses keadilan.

“Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mendengar langsung praktik dan tantangan para paralegal di lapangan. Melalui diskusi seperti ini, kita dapat memperkuat sinergi antar unsur hukum di daerah agar layanan bantuan hukum semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Dianor.

Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif, menyoroti berbagai inisiatif positif para paralegal dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum secara nonlitigasi di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan paralegal Posbankum se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin termotivasi untuk terus berperan aktif sebagai agen perubahan hukum di masyarakat, sekaligus mendukung misi Kemenkum dalam memperluas akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.



1 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Bimtek Aktualisasi Paralegal Posbankum se-Hulu Sungai Selatan



Banjarbaru, Humas_Info – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Bimbingan Teknik Aktualisasi Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sabtu, 1 November 2025, bertempat di Hotel Novotel Banjarmasin Airport, Banjarbaru.

Kegiatan ini diikuti oleh 148 paralegal yang berasal dari desa dan kelurahan di 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Loksado, Padang Batung, Telaga Langsat, Angkinang, Daha Selatan, Daha Barat, dan Daha Utara. Turut hadir berbagai unsur lembaga dan instansi, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Pengadilan Negeri Kandangan, Polres HSS, Kejaksaan Negeri HSS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), LKBH Universitas Widya Karya, dan LBH Negara Daha.

Dalam kegiatan tersebut, para paralegal dari desa dan kelurahan memaparkan hasil aktualisasi kegiatan bantuan hukum dan penyuluhan masyarakat yang telah dilaksanakan di wilayah masing-masing. Setiap peserta berbagi pengalaman terkait permasalahan hukum di masyarakat, strategi penyelesaian non litigasi, hingga langkah kolaboratif dalam memperkuat kesadaran hukum warga.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi melalui Penyuluhan Hukum Ahli Muda, Dianor, yang memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil aktualisasi para paralegal, serta mendorong peningkatan peran mereka sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses keadilan.

“Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mendengar langsung praktik dan tantangan para paralegal di lapangan. Melalui diskusi seperti ini, kita dapat memperkuat sinergi antar unsur hukum di daerah agar layanan bantuan hukum semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Dianor.

Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif, menyoroti berbagai inisiatif positif para paralegal dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum secara nonlitigasi di tingkat desa dan kelurahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan paralegal Posbankum se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin termotivasi untuk terus berperan aktif sebagai agen perubahan hukum di masyarakat, sekaligus mendukung misi Kemenkum dalam memperluas akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa

